



TAHUN 2020

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH
(L A K I P)**

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2020 ini telah selesai disusun.

LAKIP Tahun Anggaran 2020 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2020. Sementara itu, Penetapan kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kedua Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Output yang diharapkan dengan diterbitkannya LAKIP Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 ini, adalah :

- 1) Terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat;



- 2) Terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/stakeholder;
- 3) Tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi;
- 4) Terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2020 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah, khususnya di wilayah kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LAKIP Tahun 2020 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP tahun anggaran yang akan datang.

Samarinda, 21 Januari 2020
Kepala Dinas,

H. ISMANSYAH, SE, M.Si
NIP. 19600929 198902 1 00



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	2
C. Sumber Daya Dinas Perhubungan	9
D. Hambatan dan Permasalahan Eksternal.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. VISI dan MISI	21
B. Tujuan Dan Sasaran.....	24
C. Strategi Dan Kebijakan	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	45
BAB IV PENUTUP	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang menyajikan data dan informasi mengenai hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban institusional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). LAKIP dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Sebagaimana **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014** Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah.

Terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Samarinda, mengalami beberapa tahap yang disebabkan terjadinya pemekaran daerah, pada tahun 1975 dibentuk instansi pemerintahan yang mengurus Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disebut DLLAJ. DLLAJ mempunyai wilayah kerja setingkat Provinsi disebut Kantor Inspeksi LLAJ Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk wilayah Kota Samarinda yang mengurus bidang tersebut adalah DLLAJ Kotamadya Samarinda.

Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang terbentuk berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2001, merupakan salah satu instansi teknis dimana dalam melaksanakan tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kinerja dan pelayanannya dapat langsung dirasakan oleh segala lapisan masyarakat.

Serangkaian upaya peningkatan kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan selama ini, baik yang bersifat fisik maupun berupa peningkatan kinerja pelayanan non fisik telah diupayakan dengan optimal.

Dengan upaya berupa pembinaan terhadap juru parkir, penataan dan pengaturan kawasan parkir, serta pengawasan/penertiban terhadap kapal-kapal sungai, penyuluhan dan



sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan berlalu lintas berupa penyuluhan keselamatan pelayaran bagi para nahkoda kapal.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

TUGAS POKOK

- Dinas perhubungan Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang “ Perhubungan” yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.
- Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas
- Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas
- Pengawasan dan Pengendalian bidang Perhubungan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

❖ SEKRETARIAT



❖ TUGAS POKOK SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas dan Pengelolaan Barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- 3) Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

❖ FUNGSI SEKRETARIAT

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b) Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c) Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- e) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan.
- f) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- g) Pengelolaan anggaran dinas dan penerimaan dinas/retribusi.
- h) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- i) Pelaksanaan verifikasi surat pertanggung jawaban keuangan.
- j) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- k) Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- l) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.
- m) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sesuai tugas fungsi dinas.

- n) Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- o) Pengordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi yang digunakan oleh lintas bidang pada dinas.
- p) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- r) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **BIDANG LALU LINTAS JALAN**

❖ **TUGAS BIDANG LALU LINTAS JALAN**

- 1) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Lalu Lintas Jalan.
- 2) Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- 3) Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

❖ **FUNGSI BIDANG LALU LINTAS JALAN**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- b) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- d) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- e) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.

- f) Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan
- g) pengembangan pelayanan sistem jaringan lalu lintas jalan raya dan pengelolaannya, pengendalian dan operasional.
- h) Penyiapan dan pelaksana koordinator forum lalu lintas
- i) Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan penetapan kinerja jalan.
- j) Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota serta koordinator pelaksanaan lomba tertib lalu lintas.
- k) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota.
- l) Pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi berkaitan operasional parkir dan penderekan.
- m) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- n) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan sistem jaringan jalan, perekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian dampak pembangunan sesuai norma, standar dan prosedur manajemen rekayasa lalu lintas.
- o) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Lalu Lintas, Pengendalian dan Ketertiban, dan Perparkiran.
- p) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- r) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

❖ **BIDANG PRASARANA**

❖ **TUGAS BIDANG PRASARANA**

- 1) Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis prasarana dan fasilitas perhubungan.
- 2) Bidang Prasarana dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.

- 3) Bidang Prasarana membawahi seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

❖ **FUNGSI BIDANG PRASARANA**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Prasarana dan Fasilitas Perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan dibidang prasarana serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Prasarana dan Fasilitas Perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- e) Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis prasarana perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
- f) Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan serta lampu penerangan jalan umum.
- g) Pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang type C.
- h) Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan operasional terminal type C.
- i) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan fasilitas dan prasarana, perekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian prasarana perhubungan.
- j) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
- k) Pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi.

- l) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
- m) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **BIDANG KESELAMATAN**

❖ **TUGAS BIDANG KESELAMATAN**

- 1) Bidang Keselamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap
- 2) jasa/pelayanan perhubungan.
- 3) Bidang Keselamatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- 4) Bidang Keselamatan membawahi seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

❖ **FUNGSI BIDANG KESELAMATAN**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan, Pelayaran dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c) Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan, Pelayaran dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan, Pelayaran dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- e) Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis Keselamatan Perhubungan dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan.
- f) Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Maritim Kota.

- g) Pelaksanaan penyusunan program audit, investigasi terhadap Keselamatan Perhubungan, Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengukuran dan Pengujian Kelaikan Kapal.
- h) Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan Pengujian Kendaraan Bermotor dan pengukuran dan Pengujian Kelaikan Kapal.
- i) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Keselamatan Perhubungan meliputi Keselamatan Jalan, Pelayaran dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- j) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- k) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
- l) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **BIDANG ANGKUTAN**

❖ **TUGAS BIDANG ANGKUTAN**

- 1) Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
- 2) Bidang Angkutan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
- 3) Bidang Angkutan membawahi seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

❖ **FUNGSI BIDANG ANGKUTAN**

- a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Angkutan meliputi Angkutan Jalan, Angkutan dan Dermaga Sungai dan Angkutan Khusus.
- c) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan Angkutan.

- d) Pelaksanaan kegiatan perumusan Angkutan.
- e) Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan trayek dan operasional dermaga.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan Angkutan.
- g) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan pemadu moda.
- h) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Angkutan meliputi Angkutan Jalan, Angkutan dan Dermaga Sungai dan Angkutan Khusus.
- i) Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- j) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdiri dari Sumber Daya Manusiadan Sumber Daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset. Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

C.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan seperti pada table berikut :

Tabel 1.1 Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2018 - 2020

NO	Jabatan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		L	P	L	P	L	P
1	Eselon II	1	0	1	0	1	0
2	Eselon III	5	0	5	0	5	0
3	Eselon IV	21	3	21	3	13	2
Jumlah		27	3	18	3	19	2
Total		30		21		21	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 202

**Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2018 – 2020**

NO	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		L	P	L	P	L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	3	0	4	0	3	0
2	SMP	3	0	4	0	4	0
3	SMA / SMK	90	19	61	18	61	9
4	Sarjana Muda (D-III)	9	1	2	2	7	2
5	Sarjana (S1/D-IV)	26	12	18	9	17	7
6	Pasca Sarjana (S2)	19	0	8	0	8	0
Jumlah		145	32	97	32	100	19
Total		177		118		119	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2020

**Tabel 1.3 Pegawai Tidak Tetap Harian / Pegawai Tidak Tetap Bulanan
Tahun 2018 – 2020**

NO	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		L	P	L	P	L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	67	3	67	3	19	1
2	SMP	18	2	18	2	17	0
3	SMA / SMK	196	17	196	17	187	25
4	Sarjana Muda (D-III)	12	2	12	2	7	0
5	Sarjana (S1/D-IV)		12	49	16	35	76
Jumlah		258	37	342	40	265	102
Total		295		382		367	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2020

**Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2018 - 2020**

No	Pangkat dan Golongan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		L	P	L	P	L	P
1	I/a Juru Muda	3	0	2	0	0	0
2	I/b Juru Muda Tk. I	0	0	1	0	3	0



3	I/c	Juru	3	0	0	0	0	0
4	I/d	Juru Tk. I	0	0	3	0	3	0
5	II/a	Pengatur Muda	26	3	3	0	1	0
6	II/b	Pengatur Muda Tk. I	18	3	13	4	13	2
7	II/c	Pengatur	39	6	36	3	21	3
8	II/d	Pengatur Tk. I	8	0	8	1	23	2
9	III/a	Penata Muda	10	2	5	2	3	0
10	III/b	Penata Muda Tk. I	22	8	13	8	9	7
11	III/c	Penata	7	4	9	2	9	3
12	III/d	Penata Tk. I	7	3	6	5	8	4
13	IV/a	Pembina	4	0	5	0	5	0
14	IV/b	Pembina Tk. I	0	0	1	0	1	0
15	IV/c	Pembina Utama Muda	1	0	1	0	1	0
16	IV/d	Pembina UtamaMadya	0	0	0	0	0	0
Jumlah			148	29	106	25	100	21
TOTAL			177		131		121	

2. Sumber Daya Lainnya

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Samarinda. menempati Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2001, selain prasarana Kantor juga dilengkapi sumberdaya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa asset bergerak maupun tidak bergerak, Sarana dan Prasarana tersebut dalam kondisi baik dan kurang baik.



**Tabel 1.6 Aset Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Tahun Per 31 Desember 2019 – 2020**

No	Nama Barang (Berdasarkan BidangBarang)	Keadaan Per 31 Des 2019		Keadaan Per 31 Des 2020	
		Jumlah	Harga (Ribuan)	Jumlah	Harga (ribuan)
1	Tanah	15	92.537.149.000,00	15	92.537.149.000,00
2	Alat - alat besar	2	3.721.124.600,00	2	4.892.281.742,00
3	Alat-alat Angkutan	64	8.153.328.510,00	64	9.524.523.910,00
4	Alat – alat Bengkel dan Alat ukur	30	4.933.624.570,00	30	4.948.625.370,00
5	Alat pertanian	10	8.000.000.000,00	10	8.000.000.000,00
6	Alat kantor dan rumah tangga	706	18.601.098.957,00	706	20.312.861.657,00
7	Alat studio dan alat komunikasi	292	2.927.376.580,00	292	4.153.384.766,00
8	Alat – alat kedokteran	1	45.879.000,00	1	337.131.400,00
9	Alat Laboratorium	86	913.504.550,00	86	1.867.844.550,00
10	Alat – alat persenjataan/keamanan	10	49.885.000,00	10	49.885.000,00
11	Bangunan Gedung	58	33.846.096.000,00	58	34.404.771.000,00
12	Monumen	1	737.815.173,00	1	652.730.173,00
13	Jalan dan Jembatan	22	23.057.841.550,00	22	23.057.841.550,00
14	Bangunan Air/Irigasi	0	0	0	0
15	Instalasi	12	6.871.898.450,00	12	6.871.898.450,00
16	Jaringan	12	10.276.943.833,00	12	10.276.943.833,00
17	Buku dan perpustakaan	8	354.552.000,00	8	0
18	Barang bercorak kebudayaan	0	1.391.675.439,00	0	0
19	Herwan dan ternak serta tanaman	10	630.813.400,00	10	354.552.000,00
20	Aset renovasi	0	0	0	0
21	set lainnya	10	2.231.738.839,00	10	0
22	Aset kondisi rusak	0	0	0	1.406.500.439,00



No	Nama Barang (Berdasarkan BidangBarang)	Keadaan Per 31 Des 2019		Keadaan Per 31 Des 2020	
		Jumlah	Harga (Ribuan)	Jumlah	Harga (ribuan)
	berat/hilang/lainnya				
23	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	2	1.406.500.439,00	2	0
24	Aset tidak berwujud	3		3	825.238.400,00
	Jumlah	1.314	468.299.196.086,00	1.319	482.774.250.513,00

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2020

Tabel.7

Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2018 - 2020

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Keterangan
Mobil Operasional	10	10	10	Kondisi Baik
Mobil Derek	3	3	3	Kondisi Baik
Mobil Uji Keliling	1	1	1	Kondisi Baik
Mobil APILL	2	2	2	Kondisi Baik
Mobil Dinas	13	13	13	Kondisi Baik
Sepeda Motor Operasional	16	16	16	Kondisi Baik
Sepeda Motor Dinas	31	31	31	Kondisi Baik
Jumlah	76	76	76	Unit

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2020

D. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN EKSTERNAL

Hambatan dan permasalahan eksternal yang dihadapi Dinas Perhubungan antara lain :

1. Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Samarinda yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat baik roda dua maupun roda empat, berimplikasi pada minat penggunaan Jasa Angkutan Umum Kota yang menurun sehingga para pengusaha atau pemilik angkutan kota tidak dapat mencapai kondisi ideal secara ekonomi dalam usahanya sehingga tidak mampu untuk melakukan penggantian atau peremajaan armadanya.
2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan sehingga perbandingan volume dan kapasitas jalan (V/C Ratio) berdampak pada penundaan dan berpotensi terjadinya kemacetan lalu lintas.
3. Belum tersedianya kantong-kantong parkir yang belum memadai sehingga berdampak pada aktivitas parkir tepi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya



sehingga berpotensi terhadap ketidak disiplin berlalulintas, kesemrawutan berlalulintas dan mengurangi kapasitas jalan, hal ini dapat diantisipasi dengan membangun kantong-kantong parkir dilahan terbuka atau membangun gedung parkir.

4. Fasilitas perlengkapan dan Keselamatan Jalan dalam bentuk Marka, Rambu, RPPJ, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan paku jalan serta pagar pengaman jalan (Guardrill) belum sebanding dengan kebutuhan jaringan jalan yang terbangun, sehingga kondisi ini terkesan kurang optimalnya dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dalam berlalulintas, hal ini dapat didukung dengan penganggaran yang proporsional.
5. Kurangnya partisipasi pengusaha angkutan sungai dan pengetahuan pemilik kapal dibidang Pelayanan Jasa Angkutan sehingga tingkat kinerja pelayanan angkutan sungai sangat rendah dan kurang diminati masyarakat.
6. Seluruh pemilik kapal sungai sangat sulit diberikan pemahaman dikarenakan latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK

Renstra ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Renstra 2016 – 2021 ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan diuraikan berikut ini.

1. Visi

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda dan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Samarinda maka visi Dinas Perhubungan kota Samarinda adalah :

” Terwujudnya system transportasi yang semakin tertib, lancar, aman, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan “ Visi tersebut mengandung beberapa makna sebagai berikut :

- Mewujudkan Sistem Transportasi dengan menggunakan dan atau menyediakan moda angkutan yang dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi segenap lapisan masyarakat.
- Mewujudkan pelayanan Transportasi yang nyaman dan dapat dinikmati segenap masyarakat.
- Mewujudkan Sistem Transportasi dengan berbagai moda angkutan yang dapat melayani atau menjangkau ke segenap wilayah Kota Samarinda, serta terjangkau.



2. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk mengartikan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta mengetahui alasan keberadaan dan perannya. Misi juga menunjukkan tujuan utama kearah mana perencanaan dan program yang ingin tercapai. Untuk itu dalam proses perumusannya harus memperhatikan masukan-masukan dari stakeholders, dan memberikan peluang untuk perubahan / penyesuaian dengan tuntutan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Samarinda memantapkan Misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Profesionalisme dan kuantitas sumber daya manusia aparatur***
- 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan.***
- 3. Meningkatkan ketersediaan kualitas Sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.***
- 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas baik darat maupun sungai***
- 5. Meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas baik darat, sungai.***
- 6. Meningkatkan Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.***

Dari hal tersebut dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud kelancaran lalu lintas orang dan barang, baik dalam lingkup Kota Samarinda



sendiri maupun pada daerah/kawasan lainnya yang merupakan daerah cakupan Kota Samarinda.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan misi dan faktor - faktor kunci keberhasilan, Dinas Perhubungan Kota Samarinda menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu ***Meningkatkan pelayanan disektor Perhubungan***, adapun pelayanan disektor Perhubungan meliputi : Pelayanan bidang Lalu Lintas, Pelayanan bidang Prasarana, Pelayanan bidang Keselamatan dan Pelayanan bidang Angkutan.

4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategi yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah :

1. **Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perhubungan, dengan indikator sebagai berikut :**

- *Prosentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik*
- *Prosentase Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota*
- *Prosentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari*

2. **Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman,**



dengan indikator sebagai berikut :

- *Prosentase berkurangnya titik macet*
- *Prosentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, L PJU dll pada jalan Kabupaten/Kota)*

Rincian Target indikator sasaran / Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal	Target					Kondisi akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan	- Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	61.87	61.87	61.87	65.81	68.87	70.00	70.00
		- Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	%	39.37	39.37	39.37	39.44	39.50	39.57	39.57
		- Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani	%	59.05	59.05	60.00	60.95	61.90	62.86	62.86



		jaringan trayek dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari								
2	Meningkatn ya kondisi lalu lintas yang tertib, lancer, aman dan nyaman	- Presentase berkurangny a titik macet	%	100	80.00	72.00	68.00	60.00	56.00	56.00
		- Presentase tersedianya fasilitas perlengkap an jalan (rambu, marka, guardrill, LPJU dll) pada jalan Kabupaten/ Kota	%	30.68	45.70	57.15	62.05	68.66	80.42	80.42

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Proses perencanaan strategis



merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertahankan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan , dengan demikian Strategi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan sarana angkutan kota
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan sarana angkutan sungai
4. Mengendalikan kemacetan dan merekayasa lalu lintas Kota
5. Meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan

B. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memperjelas strategi menjadi lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki kebijakan, yaitu :

1. Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas perhubungan
2. Peremajaan angkutan kota (Daftar ulang armada), penataan rute dan uji laik kendaraan
3. Pelayanan perizinan angkutan sungai dan Sosialisasi keselamatan pelayaran



4. Pengawasan dan pengendalian lalulintas, penataan parkir dan optimalisasi fungsi APILL dan ATCS
5. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan

6. PROGRAM

Dalam rangka mencapai sasaran dengan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, diuraikan program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	PROGRAM
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan profesionalisme dan kuantitas sumber daya manusia aparatur.2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan.3. Meningkatkan ketersediaan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan yang memadai.4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas baik darat maupun sungai.5. Meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu	Meningkatkan pelayanan disektor Perhubungan	<ol style="list-style-type: none">1. Program pelayanan administrasi perkantoran2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur3. Program peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan4. Program pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan5. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ6. Program peningkatan pelayanan angkutan7. Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan8. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor9. Program peningkatan dan



lintas baik darat maupun sungai.		pengamanan lalulintas
6. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.		

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2020 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2020, secara rinci adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan	- Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	68.87%
		- Presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang	39.50%



		telah tersedia jaringan untuk jaringan jalan kabupaten/Kota	
		- Presentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	61.90%
2	Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman	- Presentase berkurangnya titik macet	60.00%
		- Presentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guadrail, LPJU dll) pada jalan kabupaten/kota	68.66%

Dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan didukung oleh sumber daya antara lain sumber daya manusia, sarana prasarana serta fasilitas yang memadai dan juga ditunjang oleh pendanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 yang diuraikan kedalam 9 (sembilan) program dan 40 (empat puluh) kegiatan.

Adapun anggaran Program /kegiatan disajikan dalam uraian sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 7) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.



-
- 9) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
 - 10) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
 - 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**
 - 11) Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
 - 4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**
 - 12) Pengadaan perangkat lunak sistem informasi
 - 13) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Dermaga
 - 5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**
 - 14) Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control system (ATCS)
 - 15) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
 - 16) Rehabilitasi halte dan gapura penyeberangan
 - 17) Pemeliharaan kendaraan operasional sungai
 - 6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**
 - 18) Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang.
 - 19) Pemeliharaan Awak Kendaraan Umum Teladan dan Pelajar Pelopor.
 - 20) Peningkatan pelayanan angkutan sungai
 - 21) Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan angkutan
 - 22) Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai
 - 23) Monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan dan armada angkutan
 - 24) Pengawasan dan pendataan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS
 - 25) Daftar ulang dan peremajaan angkutan kota
 - 7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**
 - 26) Pembangunan gedung dermaga mahakam hilir
-

**8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**

27) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

9. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

28) Peningkatan pelayanan perparkiran

29) Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota

Samarinda

30) Pengawasan dan pembinaan lalu lintas jalan

31) Penunjang operasional ruang kendali area traffic control system (ATCS)

32) Pengadaan marka jalan

33) Pengadaan rambu – rambu lalu lintas jalan

34) Pembuatan zona selamat sekolah (ZOSS)

35) Peningkatan penataan parkir kota Samarinda

36) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dalam kota Samarinda

37) Pengadaan dan pemasangan jaringan dan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dalam kota Samarinda (Bankeu P – APBD 2020)

38) Pemeliharaan marka dan jalan dalam kota Samarinda (Bankeu 2020)

TABEL KETERKAITAN SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, TARGET DAN PROGRAM/KEGIATAN

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan	1. Prosentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	68.87 %	Program : Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan Kegiatan: 1. Pengadaan perangkat lunak system informasi	629.890.000 79.890.000



Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
			2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuh	550.000.000
			Program : Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan:	
			1. Pemeliharaan traffic light dan jaringan area traffic control System (ATCS)	1.284.070.000
			2. Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU)	950.000.000
			3. Rehabilitasi halte dan gapura penyeberangan	200.000.000
			4. Pemeliharaan kendaraan operasional sungai	100.000.000
			Program : Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	12.500.000.000
			1. Pembangunan gedung dermaga Mahakam hilir	12.500.000.000
	2. Prosentase tersedianya	39.50 %	Program : Peningkatan	748.850.000



Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
	angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota		pelayanan angkutan Kegiatan : 1. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 2. Pemilihan awak kendaraan umum teladan dan pelopor 3. Peningkatan pelayanan public pada pelayanan proses perizinan angkutan 4. Monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan dan armada angkutan 5. Daftar ulang dan peremajaan angkutan kota Program : Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Kegiatan: 1. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	470.400.000 40.000.000 88.475.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000
	3. Prosentase	61.90 %	Program : Peningkatan	



Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
2. Meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman	tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	60.00 %	pelayan angkutan Kegiatan : 1. Peningkatan pelayanan angkutan sungai 2. Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai 3. Pengawasan dan pendataan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	275.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000
	1. Prosentase berkurangnya titik macet		Program : Peningkatan dan pengamanan lalu lintas Kegiatan : 1. Peningkatan pelayanan parkir 2. Penunjang kegiatan forum lalu lintas & angkutan jalan kota Samarinda 3. Pengawasan dan pembinaan lalu lintas jalan 4. Penunjang operasional ruang kendali area traffic control system (ATCS)	1.155.000.000 250.000.000 200.000.000 55.000.000 250.000.000



Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
			5. Peningkatan penataan parkir kota Samarinda	400.000.000
	2. Prosentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guadrill,LPJU dll pada jalan kabupaten/kota)	68.66 %	Program : Peningkatan dan pengamanan lalu lintas Kegiatan : 1. Pengadaan marka jalan 2. Pengadaan rambu – rambu lalu lintas 3. Pembuatan zona selamat sekolah (ZOSS) 4. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dalam kota Samarinda 5. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dalam kota Samarinda (Bankeu P-APBD 2020) 6. Pemeliharaan marka dan jalan dalam kota samarinda	9.124.691.000 840.000.000 100.000.000 800.000.000 6.315.000.000 1.000.000.000 69.691.000



Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
			(Banku 2019) (Realokasi 2019)	

**Rincian Target indikator sasaran / Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sebelum Reviu Renstra**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target					Kondisi akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Perhubungan	- Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	65.00	70.00	75.00	80.00	90.00	90.00	90.00
		- Presentase ketersediaan dokumen bidang Perhubu	%	40.17	41.67	87.50	91.67	95.83	100	100



	nganKot a Samarin da									
		- Presentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah mencapai standar pelayanan minimal	%	65.00	70.00	75.00	80.00	90.00	100	100
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran serta keamanan lalu lintas jalan dan sungai serta menurunnya kasus pelanggaran lalu lintas jalan		- Presentase berkurangnya titik kemacetan	%	96.00	88.00	80.00	72.00	64.00	54.00	54.00
		- Presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	%	50.69	51.18	51.68	52.19	52.70	53.22	53.22
		- Presentase kapal angkutan sungai yang	%	100	100	100	100	100	100	100



		memiliki ijin usaha angkuta n sungai								
		- Presenta se kendara an bermoto r yang diuji	%	90.00	93.55	95.00	97.11	99.11	100	100
		- Presenta se menuru nnya angka kecelaka an baik didarat maupun sungai	%	62.41	56.39	52.63	49.00	45.11	41.35	41.35
		- Presenta se fasilitas perlengk apan jalan (Rambu, marka, guardrail , ZOSS, APILL, LPJU) pada jalan kab/kota	%	30.17	47.66	57.68	62.75	72.68	80.44	80.44



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawabannya atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan perlu dilakukan Pengukuran tingkat kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2020. Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan Target dan Realisasi yang dilaksanakan melalui **9 Program dan 44 Kegiatan** yang terdiri dari :

3. Program Administrasi Perkantoran

- 8) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 9) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 11) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 12) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 14) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 11) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.



-
- 12) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
 - 13) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
 - 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**
 - 11) Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
 - 9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**
 - 12) Pengadaan Perangkat Lunak Sistem Informasi
 - 13) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Dermaga dan Pelabuhan
 - 10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**
 - 14) Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control system (ATCS)
 - 15) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
 - 16) Rehabilitasi halte dan gapura penyeberangan
 - 17) Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sungai
 - 11. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**
 - 18) Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang.
 - 19) Pemeliharaan Awak Kendaraan Umum Teladan dan Pelajar Pelopor.
 - 20) Peningkatan pelayanan angkutan sungai
 - 21) Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan angkutan
 - 22) Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai
 - 24) Monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan dan armada angkutan
 - 25) Pengawasan dan pendataan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS
 - 26) Daftar Ulang dan Peremajaan Angkutan Kota
 - 12. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**
 - 27) Pembangunan Gedung Dermaga Mahakam Hilir
-



13. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

28) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

9. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

28) Peningkatan pelayanan perparkiran

29) Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota Samarinda

30) Pengawasan dan pembinaan lalu lintas jalan

31) Penunjang operasional ruang kendali area traffic control system (ATCS)

32) Pengadaan marka jalan

33) Pengadaan rambu – rambu lalu lintas jalan

34) Pembuatan zona selamat sekolah (ZOSS)

35) Peningkatan Pelayanan Perparkiran

36) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dalam kota Samarinda

37) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dalam Kota Samarinda (Bankeu P – APBD 2020)

38) Pemeliharaan Marka dan Jalan Dalam Kota Samarinda (Bankeu 2019) (Realokasi 2019)

Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut diukur dengan **5 (lima) indikator kinerja yang selanjutnya disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) dan ditetapkan menjadi perjanjian kinerja** dalam setiap tahunnya dan perjanjian kinerja tersebut diukur pencapaiannya dalam setiap tahun sebagai tolok ukur capaian keberhasilan.

Adapun Target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2020 realisasi capaiannya menunjukkan bahwa 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil baik.



Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) / Perjanjian Kinerja 2020 disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan	1 Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	68.87 %	71.33 %	103 %
		2 Presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	39.50 %	39.50 %	100 %
		3 Presentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	61,90 %	61.90 %	100 %
2	Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman	4 Presentase berkurangnya titik macet	60.00 %	60.00 %	100 %
		5 Presentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, LPJU dll pada jalan Kabupaten/Kota)	68.66 %	68.66 %	100 %

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisa Capaian Kinerja terhadap 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dijabarkan dalam uraian sebagai berikut :

A. Sasaran 1 (satu) *Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan mempunyai 3 (tiga) indikator yaitu :*

1 Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik

Menunjukkan presentase jumlah sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas



Perhubungan, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 68.87% dengan realisasi sebesar 71.33% sehingga capaian kinerjanya sebesar 103%, dengan capaian sebesar 103% maka realisasi indikator presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik melebihi target yang telah ditetapkan.

Pengukuran Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

Jumlah sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik (111 unit)

$$\frac{X}{\text{Jumlah sarana dan prasarana Perhubungan yang ada (130 unit)}} \times 100\%$$

Jumlah sarana dan prasarana Perhubungan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana yang ada	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik
1	Gedung kantor	1	1
2	Jemb. Peny	4	2
3	Halte	39	38
4	Dermaga	5	2
5	Sub. Terminal	4	1
6	Kend. Oprasional	76	66
7	Unit PKB	1	1
	Jumlah	130	111

2 *Presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota adalah presentase*



jumlah ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan pada jaringan jalan di Kota Samarinda guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 39.50% dengan realisasi sebesar 39.50% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% maka realisasi indikator presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota (602 unit)

X 100

Jumlah angkutan umum yang seharusnya ada yang Melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kab/kota (1524)

Jumlah angkutan umum yang ada dan seharusnya ada disajikan dalam table sebagai berikut:

No	Angkutan umum yang ada (siap beroperasi)	Angkutan umum yang seharusnya ada dan siap beroperasi
1	602 unit	1524 unit

3 Presentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari adalah presentase jumlah ketersediaan kapal sungai dan danau yang melayani jaringan trayek dalam Kota Samarinda pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari guna



meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 61.90% dengan realisasi sebesar 61.90% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% maka realisasi indikator tersebut diatas sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran Presentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari adalah presentase jumlah ketersediaan kapal sungai dan danau yang melayani jaringan trayek dalam Kota Samarinda pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari adalah sebagai berikut:

Jumlah kapal sungai dan danau yang sudah tersedia untuk melayani jaringan trayek dalam kab/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari (65 unit)

***X 100%
Jumlah kapal sungai dan danau yang seharusnya tersedia untuk melayani jaringan trayek dalam kab/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari (105 unit)***

Jumlah kapal sungai dan danau yang sudah tersedia dan seharusnya tersedia disajikan dalam table sebagai berikut:

No	Kapal sungai dan danau yang tersedia	Kapal sungai dan danau yang seharusnya ada
1	65 unit	105 unit



B. Sasaran 2 (dua) *Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman mempunyai 2 (dua) indikator yaitu :*

1. *Presentase berkurangnya titik macet* menunjukkan berkurangnya titik kemacetan di jalan Kota Samarinda guna meningkatkan kondisi lalulintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 60.00% dengan realisasi sebesar 60.00% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% maka realisasi indikator Presentase berkurangnya titik macet sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran Presentase berkurangnya titik macet adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah titik macet tahun (n)} \\ \text{(15 titik)} \\ \times 100\%}{\text{Jumlah titik macet tahun} \\ \text{eksisting (25 titik)}}$$

Data jumlah titik macet disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tahun	Jumlah titik macet tahun (n)	Jumlah titik macet tahun eksisting
2016	25	25
2017	20	25
2018	18	25
2019	17	25



2020	15	25
2021	14	25

2. **Presentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, LPJU dll) pada jalan Kabupaten/Kota** adalah presentase jumlah fasilitas perlengkapan jalan terpasang dan tersedia pada jalan Kota Samarinda guna meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 68.66% dengan realisasi sebesar 68.66% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% maka realisasi indikator Presentase berkurangnya titik macet sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran Presentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, LPJU dll) pada jalan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

***Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang
(rambu, marka, guadrile, LPJU dll)***

68.66%

X 100%

***Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan
(rambu, marka, guadrile, LPJU, dll)***

100%

Data jumlah fasilitas perlengkapan jalan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Jenis fasilitas perlengkapan jalan	Fasilitas perlengkapan jalan terpasang	Kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan
1	Rambu	2700 unit	5000 uit
2	Jemb. Peny	4 unit	4 unit
3	Cermin T	9 unit	50 buah



4	Warning L	4 unit	10 buah
5	Marka (m)	8500 meter	9000 meter
6	Pagar PJ (m)	3000 meter	3500 meter
7	Zoss	20 titik	20 titik
8	Papan NJ	300 buah	800 buah
9	LPJU	13.124 buah	25.000 buah
10	RPPJ	150 buah	200 buah
11	APILL	34 titik	34 titik

Faktor pendukung keberhasilan sasaran ini adalah :

- Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik dan memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal
- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kota Samarinda serta Terjalannya kerjasama/koordinasi yang baik antar elemen untuk meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman

Hambatan/Permasalahan :

- Ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum sepenuhnya memadai dan perlu adanya perbaikan dan rehabilitasi
- Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mentaati peraturan tata tertib berlalu lintas

Pemecahan Masalah :



- Perlunya melakukan rehabilitasi pada sarana dan prasarana Perhubungan terutama pada sarana dan prasarana pelayanan publik seperti terminal, dermaga dan angkutan umum
- Perlunya pengendalian dan pengawasan terhadap lalu lintas jalan serta koordinasi yang baik antar elemen dan perlunya peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan

Dibandingkan dengan target dan realisasi capaian pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 maka target dan realisasi capaian pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup baik.

Sebagai bahan perbandingan maka Target dan realisasi capaian pada tahun 2019 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel target dan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) /
Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan	1 Prosentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	65.81%	65.81%	100%
		2 Prosentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	39.44%	39.44%	100%
		3 Prosentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan	60.95%	60.95%	100%



			trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia yang dapat dilayari			
2.	Meningkatnya kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman	4	Prosentase berkurangnya titik macet	78.00%	78.00%	100%
		5	Prosentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, quadrill, LPJU dll) pada jalan kabupaten/kota	62.05%	62.05%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Dari Pagu Anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020 setelah Perubahan Anggaran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki Anggaran sebesar **Rp. 57.552.541.000,00** (*Lima puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*) terealisasi dengan anggaran **Rp. 51.654.779.496,00** (*Lima puluh satu milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah*) dengan sisa dana **Rp. 5.897.761.504,00** (*Lima milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu lima ratus empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	PERSEN	SISA DANA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29.612.114.000	27.278.019.568	92,12	2.334.094.432



1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	20.000.000.000	18.899.271.888	92,45	1.100.728.112
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	35.000.000	100	0.00
3	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	200.000.000	171.240.000	85,62	28.760.000
4	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.000.000	100	0.00
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	70.000.000	66.155.000	94,51	3.845.000
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	256.700.000	206.189.800	80,32	50.510.200
7	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	9.045.414.000	7.895.162.880	87,28	1.150.251.120

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	772.353.000	653.244.490	84.58	119.108.510
8	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100.000.000	99.795.000	99,80	205.000
9	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional	630.853.000	512.059.490	81,17	118.793.510
10	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	41.500.000	41.390.100	99,73	110.000
3	Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.000.000	100.000.000	100	0.00
11	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	100.000.000	100.000.000	100	0.00
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	629.890.000	622.812.000	98.88	7.078.000
12	Pengadaan perangkat lunak system informasi	79.890.000	79.890.000	100	00
13	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dermaga dan pelabuhan	550.000.000	542.922.000	98,71	7.078.000



5	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	2.534.070.000	2.503.605.416	98.80	30.464.584
14	Pemeliharaan traffic light dan jaringan area traffic control system (ATCS)	1.284.070.000	1.263.699.300	98.41	20.370.700
15	Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU)	950.000.000	940.947.100	99.05	9.052.900
16	Rehabilitasi halte dan gapura penyeberangan	200.000.000	199.333.000	99.67	667.000
17	Pemeliharaan kendaraan operasional sungai	100.000.000	99.626.016	99.63	373.984
6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.515.548.000	1.494.179.082	98.59	21.368.918
18	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	470.400.000	430.612.800	91.54	39.787.200
19	Pemilihan awak kendaraan umum teladan dan pelajar pelopor	40.000.000	40.000.000	100	0.00
20	Peningkatan pelayanan angkutan sungai	100.000.000	100.000.000	100	0.00
21	Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan angkutan	88.475.000	88.452.616	99.97	22.384
22	Kampanye dan SAR keselamatan pelayaran sungai	100.000.000	91.170.000	91.17	8.830.000
23	Monotoring dan evaluasi terhadap perusahaan dan armada angkutan	100.000.000	99.899.602	99.90	100.398
24	Pengawasan dan pendataan kolam pelabuhan galangan kapal dan TUKS	75.000.000	75.000.000	100	0.00
25	Daftar ulang dan peremajaan angkutan kota	50.000.000	50.000.000	100	0.00
7	Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	12.500.000.000	12.500.000.000	100	0.00
26	Pembangunan gedung dermaga Mahakam ilir	12.500.000.000	12.500.000.000	100	0.00



	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	100.000.000	94.200.000	94.20	5.800.000
	27 Peningkatan fsilitas penunjang pengujian kendaraan bermotor	0	0	0	0
	28 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	100.000.000	94.200.000	94.20	5.800.000
9	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	10.279.691.000	10.035.564.070	97.63	244.126.930
	29 Peningkatan pelayanan perparkiran	250.000.000	247.403.400	98.96	2.596.600
	30 Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda	200.000.000	193.224.830	96.61	6.775.170
	31 Pengawasan dan Pembinaan lalu lintas jalan	55.000.000	55.000.000	100	0.00
	32 Penunjang Operasional Ruang Kendali Area Traffic Control System (ATCS)	250.000.000	232.828.000	93.13	17.172.000
	33 Pengadaan marka jalan	840.000.000	839.261.840	99.91	738.160
	34 Pengadaan rambu – rambu lalu lintas jalan	100.000.000	99.484.000	99.48	516.000
	35 Pembuatan zona selamat sekolah (ZOSS)	800.000.000	784.680.000	98.09	15.320.000
	36 Peningkatan penataan parkir kota samarinda	400.000.000	399.124.300	99.78	875.700
	37 Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dalam kota samarinda	750.000.000	738.037.000	98.40	11.963.000
	38 Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dalam kota Samarinda (Bankeu P – APBD 2020)	1.000.000.000	996.262.500	99.63	3.737.500
	39 Pemeliharaan marka dan jalan dalam kota Samarinda (Bankeu 2020) (Realokasi 2019)	69.691.000	69.575.600	99.83	115.400



Dari jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020 diatas dapat kita lihat, Dinas Perhubungan melalui Realisasi Anggaran 2020 memperoleh capaian kinerja sebesar **89,75 %**. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan efisiensi Anggaran dari jumlah awal yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda :

- Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : **Rp. 57.552.541.000,00**
- jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : **Rp. 51.654.779.496,00**
- dengan sisa Anggaran Tahun 2020 : **Rp. 5.897.761.504,00**



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020, dan disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan. Akan tetapi tentu saja masih banyak kekurangan - kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Berkat kerja sama semua unsur yang terkait (Bidang Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Prasarana, Bidang Keselamatan dan Bidang Angkutan di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda) dalam mengumpulkan informasi data yang diperlukan, maka LAKIP ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2020 ini, dengan harapan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2020 ini dapat digunakan sebagai tolok ukur, media evaluasi, monitoring dan laporan data/informasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.